

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Abdul Hamid, 2016, *Teori Negara Hukum Modern*, Pustaka Setia, Bandung

Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Ajudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta

Harrys Pratama Teguh, 2019, *Hukum & Peradilan Konstitusi Indonesia Sebuah Kajian Teori dan Kritik Hukum Acara Konstitusi*, Pustaka Referensi, Yogyakarta

Hariyono dkk, 2013, *Membangun Negara Hukum yang Bermanfaat*, Setara Press, Malang

Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Cetakan Pertama*, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung

Jimly Ashiddiqie, 2006, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Catatan Ketiga, Konstitusi Press, Jakarta

Jimly Ashiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta

Martitah, 2003, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislator ke Positive Legislator*, Konstitusi Press (Konpres), Jakarta

Miriam Budiardjo, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rimdan, 2013, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta

Dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XXI/2015

Jurnal

Agus Dedi, 2019, *Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak*, Jurnal Moderat, Vol.5, No.3

Ahmad Mudatsir, Samsuri, 2023, *Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC*, Peradaban Journal Law and Society, Vol.2, Issue 2

Andre G. Mawey, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Lex Crimen Vol. V, No. 2

Arbi Sanit, 2015, *Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Kelembagaan dan Kepemimpinan*, Jurnal Politik, Vol.1, No.1

Fauzi Iswari, 2020, *Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.6, No.1

Geofani Milthree Saragih, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara Indonesia*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol, IX, No 1

Habibatul Umam Taqiuddin, 2017, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol.1, No.2

- HM Thalhah, 2019, *Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 3
- Maria Farida Indrati, *Disenting Opinion dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013*, hal. 92. Lihat juga, *Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008*. Baca juga: *Gardha Galang Mantara Sukma, Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)*, Lex Renaissance Nomor 1 Vol. 5, Januari 2020, hal. 1-19.
- Moch Nurhasim, 2014, *Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik, Vol.11, No.1
- Nurul Qamar, 2012, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1
- Rio Subandri, 2024, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2, No.1
- Shandy Patria Airlangga, 2019, *Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis*, Jurnal Cepalo, Vol.3, No 1
- Sayid Anshar, 2019, *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Kopertis, Vol.2, No 2
- Susianto, 2023, *Mahkamah Konstitusi:Etika Kehakiman dan Kendaran Politik Penguasa*, Binamulia Hukum, Vol. 12, No.2

Skripsi dan Disertasi

Muhammad Zainal Abidin, 2012, *Perumusan Norma Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Skripsi, Universitas Airlangga

Siti Fatimah, 2014, *Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Internet

Dikutip dari laman <https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-kewenangan-dan-kewajiban-mahkamah-konstitusi>, diakses Pada 9 Desember 2023, Pukul 09.29 WIT

“Data Permohonan perkara MK”

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18788&menu=2>, diakses pada 13 Maret 2024, Pukul 12.00 WIT

Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi Oleh Mahkamah Konstitusi, dikutip

dari: <https://sleei.law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1274/2020/07/PENEMUAN-HUKUM-DAN-PENGGUNAAN-YURISPRUDENSI-I-D.G.-Palguna-SLEEI-FH-UGM.pdf>, (Senin, 22 April 2024)

Susi Dwi Harjanti, 2023, *Strong Abuse Judicial review*, disampaikan pada Eksaminasi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta